

ANALISIS BELANJA DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Irdha Anisyah Marsudi Gorahe, Vecky Masinambow dan Daisy Engka

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: Irdhaanisyah@gmail.com*

ABSTRAK

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, dimana pengeluaran tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan luas wilayah terhadap belanja daerah pada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. dengan jenis *time series data* dan *cross section data* (data panel) dalam bentuk tahunan. Data *time series* yang digunakan dimulai dari periode 2010 sampai 2012, Sedangkan data *cross section*nya adalah 15 daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Alat yang digunakan penelitian adalah regresi panel data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Kata Kunci : Belanja Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah.

1. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu daftar atau pernyataan yang terperinci mengenai kondisi keuangan negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara. Keuangan Negara adalah hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengaruhnya terhadap perekonomian. Seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran diperhitungkan oleh pemerintah secara cermat dan teliti serta bertanggung jawab, yang semuanya disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendapatan atau penerimaan suatu negara itu diperoleh dengan hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan negara, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum, dan Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pengeluaran dan penerimaan daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tujuan dan fungsi APBD pada prinsipnya, sama dengan tujuan dan fungsi APBN. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Belanja daerah biasanya direalisasikan digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, dan untuk belanja modal.

Tiga komponen APBD yaitu belanja daerah, pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, sangat mempengaruhi keberhasilan perekonomian suatu daerah, Jika ketiganya diolah dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi perekonomian daerah.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung belanja tidak langsung belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa. Sedangkan Belanja Langsung meliputi belanja pegawai barang dan jasa, Belanja Modal.

Untuk meningkatkan belanja daerah, jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harus besar. Karena semakin besar PDRB, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota dengan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan

berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan public. (Lin dan Lun 2000).

Pengeluaran Belanja daerah dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah, apabila perkembangan jumlah penduduk semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar. Karena meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

Penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah

Unsur pembentuk suatu negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Rakyat termasuk syarat terbentuknya suatu negara yang bersifat konstitutif atau mutlak. Rakyat suatu negara meliputi penduduk dan bukan penduduk (orang asing). Bukan penduduk adalah orang yang ada di wilayah suatu negara tetapi tidak bermaksud untuk menetap dan tinggal di negara yang bersangkutan.

Wilayah adalah tempat dimana menetapnya rakyat dan merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan Negara. Penyelenggaraan pemerintahan Negara meliputi Wilayah darat dan wilayah laut. Konsep wilayah timbul melalui dua fase yang mencerminkan kemajuan ekonomi, yaitu dari perekonomian pertanian yang sederhana ke sistem industri yang kompleks. Selanjutnya, dalam hubungan dengan wilayah formal yang homogen dan wilayah fungsional yang polarized atau nodus, maka diungkapkan oleh Glasson bahwa wilayah perencanaan adalah kombinasi dari wilayah formal dan wilayah fungsional, sehingga dengan sendirinya wilayah tersebut mengandung sifat-sifat kedua jenis wilayah yang menyusunnya. Karena itu, wilayah perencanaan merupakan wilayah geografik yang dikelola sehingga relatif lebih cocok untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan regional.

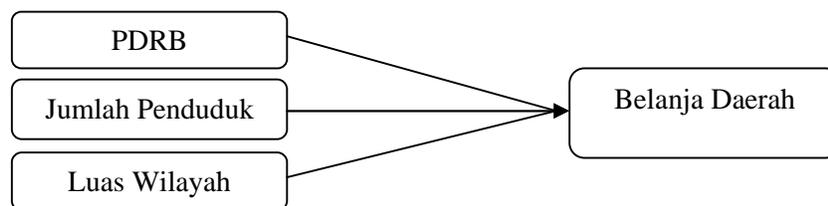
Wilayah perencanaan dan wilayah pelaksanaan pembangunan cenderung berhimpit atau sejalan dengan wilayah administratif pemerintahan, dimana berbagai kegiatan pembangunan mendapatkan pengaturannya. Wilayah pembangunan merupakan bagian penting dalam studi wilayah. Pengenalan, penelahan, peramalan dan perencanaan wilayah berkaitan dengan wilayah pembangunan. Sebaliknya, berbagai program pembanguana, biak fisik maupun non fisik memerlukan atau sering terkait dengan informasi dan strategi kewilayahan.

Penelitian terdahulu Hadi sasana (2010) diperoleh hasil PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah PDRB Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/kota Provinsi SULUT, Apakah Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/kota Provinsi SULUT dan Apakah Luas Wilayah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/kota Provinsi SULUT.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Utara, Untuk mengetahui pengaruh Jumlah penduduk terhadap Belanja daerah di Sulawesi Utara, dan Untuk mengetahui pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Utara.

Untuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Teoritis

APBD

APBD merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dalam melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di internal eksekutif itu sendiri.

BELANJA DAERAH

Menurut Priyo (2009:4), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan

sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabelvariabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal.

Belanja daerah menurut Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.

PDRB

Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa.

Dalam perhitungannya, untuk menghindari hitung ganda, nilai output bersih diberi nama secara spesifik, yaitu nilai tambah (*value added*). Demikian juga harga yang digunakan dalam perhitungan ini adalah harga produsen. Penilaian pada harga konsumen akan menghilangkan PDRB subsektor perdagangan dan sebagian subsektor perdagangan dan sebagai subsector pengangkutan.

LUAS WILAYAH

Salah seorang pelopor ilmu wilayah, katakana Walter Israd, tidak secara tegas mau menyatakan apa yang dimaksud dengan “wilayah” pada ilmu tersebut. Wilayah pada ilmu wilayah adalah suatu wilayah administrasi pada tingkat subnasional seperti satu propinsi, satu kabupaten atau yang lainnya. Kemudian wilayah itu dianalisis. (Asep Mulyadi : 1)

Wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup pengamatan atas suatu atau lebih fenomena atau kenampakan tertentu. Penekanan pada unsur bagian permukaan oleh berbagai ahli. Sebelum diungkapkan lebih jauh, terdapat beberapa istilah lain sebagaimana disebutkan diatas, yang memiliki pengertian sama atau mendekati peringatan wilayah, seperti daerah, region, kawasan, zone, area, jalur, distrik dan sector. Dalam hal ini faktor ketetapan penggunaan istilah-istilah tersebut sangat tergantung pada konteks pembahasan dan kezalimannya.(Asep Mulyadi : 1)

Menurut Djenen yang dikutip oleh J.E Sitanala (Asep Mulyadi : 1) memberikan batasan tentang wilayah yaitu sebagai permukaan bumi yang memiliki kesamaan yang

berdasarkan unsur-unsur tertentu yang dipilih. Atas dasar itulah wilayah dapat diciptakan bermacam-macam, misalnya wilayah yang berdasarkan administrasi pemerintah (kabupaten, propinsi). Wilayah geografis (lembah, daratan, pegunungan, hutan), wilayah pemukiman tingkat pembangunan.

PENDUDUK

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

Mortalitas (Kematian)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda – tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perancangan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa – jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program – program kebijakan penduduk.

Migrasi

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya densitas (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya

faktor – faktor pendorong dan penarik bagi orang – orang untuk melakukan migrasi, di pihak lain, komunikasi termasuk transportasi semakin lancar.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara atau pun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Migrasi antar bangsa (migrasi internasional) tidak begitu berpengaruh dalam menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu negara kecuali di beberapa negara tertentu yang berkenaan dengan pengungsian, akibat dari bencana baik alam maupun perang. Pada umumnya orang yang datang dan pergi antarnegara boleh dikatakan berimbang saja jumlahnya. Peraturan – peraturan atau undang – undang yang dibuat oleh banyak negara umumnya sangat sulit dan ketat bagi seseorang untuk bisa menjadi warga negara atau menetap secara permanen di suatu negara lain.

2. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Belanja Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Sulawesi Utara dari tahun 2010-2012 (Per-Kabupaten/Kota) *time series*. Sumber data berasal dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, dan jurnal. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganti panel data. Dengan menggunakan *Fixed Effect Model*.

Untuk menentukan model panel data yang cocok digunakan adalah dengan melakukan uji chow dan uji hausman, uji chow digunakan untuk memilih antara model OLS dan FEM. Caranya dengan membandingkan Chi Square tabel dan Chi Square statistik jika Chi Square statistik lebih besar dari Chi Square tabel maka model yang cocok digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

$$Y_{i,t} = X_{i,t} + C_i + dt + i_{i,t}$$

C_i = konstanta yang bergantung pada unit ke- i , tetapi tidak pada waktu t

dt = Konstanta yang bergantung pada waktu t tetapi tidak pada unit i

komponen C_i dan dt disebut model efek satu arah, sedangkan $C_i = 0$ dan $dt = 0$ disebut model efek tetap satu arah. Apabila banyaknya observasi sama untuk semua kategori kali-silang, model dikatakan bersifat seimbang (*balanced*) dan jika sebaliknya disebut tidak seimbang (*imbalanced*) (Rosadi, 2010 : 262)

Adapun model penelitian secara umum adalah :

$$Y_t = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y_t = Belanja Daerah

a = konstanta

X_1 = PDRB

X_2 = Jumlah Wilayah

X_3 = Luas Wilayah

e = error term

$b_1 - b_3$ = koefisien regresi dari tiap – tiap variabel independen

Menggunakan uji asumsi klasik antara lain uji multikolinieritas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen yang dilakukan dengan Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi dengan nilai di atas 0,80 maka hal tersebut menunjukkan terdapat masalah kolinearitas (Gujarati, 2012). Uji heterokedastisitas salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan menggunakan White Test. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat probabilitas $Obs * R$ -squared. Apabila nilai probabilitas $Obs * R$ -squared lebih besar dari taraf nyata tertentu maka persamaan tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya. Dan Uji Autokorelasi Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Godfrey, sehingga dikenal juga dengan sebutan The Breusch-Godfrey (BG) Test. Selanjutnya dilakukan Uji Statistik antara lain Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), Nilai Koefisien Determinasi (R^2), (dikutip dalam Belangkaeche Rebeka, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi klasik

Tabel 1 : Uji Multikolinieritas

	BD	PDRB	JP	LW	JW
BD	1	0.432124	-0.04782	-0.05133	-0.12256
PDRB	0.432124	1	0.573558	-0.08674	0.342568
JP	-0.04782	0.573558	1	-0.00426	0.448277
LW	-0.05133	-0.08674	-0.00426	1	0.128044
JW	-0.12256	0.342568	0.448277	0.128044	1

(Sumber : Diolah dari hasil Regresi 2014)

Terlihat dari tabel 1 dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas. Karena setiap variabel memiliki korelasi lebih kecil dari 0,90.

Tabel 2 : Uji Autokorelasi

$R^2 = 0.005862$
chi squares (X^2) = 0.263797
nilai (X^2) Tabel pada 10% = 4.60517
nilai (X^2) Tabel pada 5% = 5.99147
nilai (X^2) Tabel pada 1% = 9.21034
Probabilitas Chi Square Statistik = 0.876430

(Sumber : Diolah dari hasil Regresi 2014)

Dari hasil regresi pada tabel 2 dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.005862. Nilai chi squares hitung (X^2), sebesar 0.263797 sedangkan nilai kritis (X^2) pada $\alpha = 1\%$ dengan df sebesar 2. Karena nilai chi squares hitung (X^2) < dari pada nilai chi squares (X^2) tabel, maka dapat disimpulkan model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Tabel 3 : Uji Heterokedastisitas

$R^2 = 0.429487$
Obs *R-squared = 19.32694
Chi-squares (χ^2) pada 5 % = 22.362
Probabilitas Chi Square Statistik = 0.113311

(Sumber : Diolah dari hasil Regresi 2014)

Dari table 3 diatas diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.429487. Nilai Chi-squares hitung sebesar 19.32694 yang diperoleh dari informasi Obs *R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R^2)). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares (χ^2) pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 13 adalah 22.362. Karena nilai kritis Chi-squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi-squares (χ^2) maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Pengujian Serempak Uji F

Nilai F-tabel dengan derajat kebebasan (4,39) dan $\alpha = 1\%$ adalah 5.398653. Dari hasil regresi diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 3.842502. Dengan demikian F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, artinya secara bersama-sama variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jenis Wilayah berpengaruh signifikan terhadap profitabilita Belanja Daerah.

Pembahasan

Setelah melakukan penelitian, bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Selanjutnya dengan peningkatan penerimaan daerah, akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Jadi PDRB dan belanja daerah memiliki hubungan yang positif. Bila PDRB mengalami peningkatan maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan.

Setelah melakukan penelitian, bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah. Karena tingginya pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang mengakibatkan kesejahteraan penduduk menjadi terganggu. Bila kenaikan penduduk lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi, maka kesejahteraan penduduk akan semakin kecil artinya terjadi pengurangan jumlah pendapatan per kapita.

Setelah melakukan penelitian, bawah luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan luas wilayah terhadap belanja daerah pada tahun 2010 – 2012. Apakah belanja daerah dapat berpengaruh oleh ketiga variabel ini di setiap kabupaten kota? Dan setelah dilakukan penelitian ini, terdapat kesimpulan bahwa PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Tapi tidak halnya dengan luas wilayah yang tidak berpengaruh signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Asep Mulyadi, Sebuah Pemahaman Tentang Wilayah.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2014.

Dewi Sintani Rohmawati, 2011, Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Sumenep.

Drs. Nurlan Darise, AK., M.Si, 2009.. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Daftar kabupaten kota yang ada di Sulawesi utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia

Gujarati , Damodar, 2003. Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, International Editions, New York.

Hubungan pengaruh PDRB terhadap belanja daerah
Abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/12/hubungan-pdrb-terhadap-belanja-daerah.html?m=1

Hadi Sasana, 2011, Analisis Determinan Belanja Daerah Dikabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal.

Kusnandar Dodik Siswantoro, Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Daerah Adi-sriyadi.blogspot.com/2008/05/prat-tesis-23.html?m=1

Pengertian dan fungsi APBD dan APBN <http://dunkitdun.blogspot.com/2013/06/apbn-dan-apbd.html>

Pengertian belanja daerah dan jenisnya <http://portalpbj.blogspot.com/2013/06/pengertian-belanja-modal-dan-jenisnya.html>

Pengertian dan definisi penduduk
http://carapedia.com/pengertian_definisi_penduduk_info2150.html

Pengertian dan definisi wilayah <http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-wilayah.html>

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemahaman tentang keuangan Negara <http://geordy-resistencia-anz.blogspot.com/2012/01/pemahaman-keuangan-negara.html>)

Penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah -
<http://www.bpkp.go.id/sulutberitaread1134515>Penyelenggaraan-Pengawasan
Pemerintahan-Daerah-yang-Efektif-melalui-Peran-SPIP-dan-APIP-yang-
Optimal.bpkp)

Ridho Argi, (2011), Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009

Sumber-sumber keuangan Negara <http://ilmu-fakta.blogspot.com/2012/03/sumber-sumber-keuangan-negara.html>)

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah.